

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Surabaya dan mengetahui peta instrumen kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Surabaya. Permasalahan yang terjadi adanya kesenjangan antara angkutan daring dan angkutan konvensional. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih mendalam mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Kota Surabaya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Kota Surabaya sejauh ini tidak efektif. Hal tersebut diketahui dari lima kriteria yang digunakan dalam penilaian efektivitas instrumen kebijakan yaitu: 1) kepatuhan kelompok sasaran terhadap instrumen kebijakan masih sangat rendah ; 2) pelaksanaan pengawasan dalam implementasi kebijakan masih sangat lemah; 3) penegakan peraturan tidak mampu membuat kelompok sasaran patuh pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017; 4) instrumen kebijakan tidak berhasil mengedukasi atau mengarahkan kelompok sasaran; dan 5) tujuan yang ingin dicapai belum jelas. Pemetaan ulang instrumen kebijakan antara lain kebijakan khusus untuk provider atau pihak penyedia aplikasi agar instrumen kebijakan mengenai pembatasan kouta taksi online dapat diterapkan; kebijakan mengenai *driver* angkutan online/angkutan sewa khusus yang menjadikan pekerjaan sambilan (*freelance*); kebijakan mengenai mekanisme pengawasan penyelenggaraan *taksi online* (angkutan sewa khusus) di Kota Surabaya; kebijakan untuk pihak penegak peraturan; serta kebijakan mengenai jam operasional angkutan sewa khusus.

Kata Kunci: Efektivitas, Instrumen Kebijakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

## ABSTRACT

*The aim of this research is to point out the public policy effectiveness of Minister of Transportation Regulation No. 108/2017 on Organization of Non-Fixed-Route Public-Transportation Services in Ride-hailing Transport Services and identify policy instrument's map of Ride-hailing Transport Services in Surabaya. The issue lays on the gap between online and conventional transportation. The Minister for Transportation Regulation No. 108/2017 is made for providing law assurance on safety, security, comfort, equality, reachability, and regularity aspect, and accommodate the growing needs of society regarding to Public-Transportation Services. This research employed qualitative exploratory approach. The data were collected from observation method, documentary research, and interview with the informants. The informants were selected through purposive sampling which meant that the informants were considered having more knowledge on Ride-hailing Transport Services in Surabaya. Technique for checking data validity employed was triangulation of data. Then, techniques of data analysis used were data reduction, data presentation and drawing conclusion.*

*The result shows that the policy instruments of Ride-hailing Transport Services in Surabaya are not effective by far. It was found out from five criteria which were employed to assess the effectiveness of policy instruments such as: 1) the obedience of targeted group towards policy instruments was still low; 2) the exertion of supervision in implementing the policy was still weak; 3) the regulatory enforcement could not make targeted group obey the Minister for Transportation Regulation No. 108/2017; 4) the policy instruments could not educate or point targeted group; dan 5) the objective was still unclear. Policy instrument mapping includes specific policies for providers or application providers in order for policy instruments on the limitation of online taxi kouta to be applied; policies on drivers of Ride-hailing Transport Services that make freelance work; policy on the mechanism of supervision of the organization of Ride-hailing Transport Services in Surabaya; policies for regulatory authorities; as well as policies concerning the operating hours of Ride-hailing Transport Services.*

*Keywords: Effectiveness, Policy instruments, Minister of Transportation Regulation No. 108/2017*